

COLONIAL EDUCATIONAL POLICY & MUHAMMADIYAH'S EDUCATION

(Analitical History Muhammadiyah in Yogyakarta 1912-1942)

Oleh: Drs. Yahdan Ibnu Human Saleh SU

Abstract

This research takes objekct of Muhammadiyah Educational Development on the Islamic Villages in Yogyakarta 1912-1942.

Muhammadiyah was an Islamic missionary organization and movement founded on November 18, 1912 by Kyai Haji Ahmad Dahlan at Yogyakarta. It had aim to spread of the true and genuine teaching of Islam among the population and especially among its members.

If the various kinds of an economic, social, political, as well as cultural aspects were the whole process of growth of Indonesian Nationalism, Muhammadiyah, for this reason, could be said had the goal or value orientation. Because it could be considered as the Muslim, social, educational and religious movement possessed the goal to attain a way of life free from colonialism.

In a colonialism situation nationalism might be seen as a social and moral force which had and orientation towards the future. In the mean while, Muhammadiyah might be understood as a group action or collective activity to face a condition of backwardness by responding according to its position.

This organization fashioned nationalism by constituting and influential moral force, that tried to moralize all developments in the society, without any political ambition whatsoever, as a response to political, cultural and social conditions.

Some social changes were introduced in 1912-1942 with a formal and non-formal education system were adopted of the methods of the West, which were practised in other activities. For these purpose, under the first four period charismatic leaders, the foundation of educational and social establishment had been set up and dedicated for the people's welfare and progress.

The social contribution given by Muhammadiyah in the field of social

welfare from 1912-1942 were : bureaucratization as the process of rationalizing organization, the establishment of the new system of educational institution (1912, 1920, 1921, 1926, 1934, 1937), the form of scout movement *Hizb al-wathan* (1918), to educate young generation, the founding of hospital and clinic (1923) and orphanage (1925) among the Indonesian in general, and the Muslim in particular, which were not only in backwardness, but also in weakest condition socially, economically and politically, suppressed by Dutch colonialism.

Muhammadiyah emphasized the importance of schools as means of education in both general and religious subjects. The combination of the two kinds of education so that became typical in all Muhammadiyah schools, from kindergartens to senior high schools. The schools established by Muhammadiyah had been most beneficial to the Indonesian people, particularly in the Dutch Colonial rule when schools were rare.

Colonial educational policy was only to supply skilled and semi-skilled labourers for industries and plantation owned by the Dutch and to fill jobs as lower government officials. It was not possible the Dutch policy to emancipate the Indonesian people from the backwardness and therefore the number of public school was kept as low as possible.

1. Latar Belakang

Pemerintah kolonial Belanda dengan semboyannya *Pax Neerlandica* bercita-cita membangun imperium di bawah kekuasaan negeri Belanda di Indonesia, mulai dari penguasaan VOC (1605 - 1799) hingga penguasaan pemerintah kolonial (1800 - 1942). Penguasaan pemerintah kolonial itu meliputi bidang-bidang : politik (militer), ekonomi dan budaya. Gejala dan keadaan seperti itu tampaknya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para pendukung imperialisme¹ yang terdiri dari negara-negara moderen dikarenakan kepentingan industrinya, atau untuk tujuan yang lain. Mereka ini kemudian dikenal sebagai bangsa penjajah, sementara bangsa lain yang dikuasai disebut sebagai bangsa yang terjajah.²

Keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia di masa silam pada hampir semua aspek kehidupan, dengan demikian kemungkinan besar merupakan akibat dari cita-cita bangsa penjajah, meski kemungkinan lain yang menjadi penyebabnya bisa saja diketemukan. Rencana Jan Pieterszoon Coen³ yang bermaksud menguasai sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di luar Indonesia serta kemudian diikuti oleh

¹David E. Apter, *The Politics of Modernization*, (Chicago : The University of Chicago Press, 1967), hlm. 67.

²Sartono Kartodirdjo, "Some Problems on the Genesis of Nationalism in Indonesia", dalam *Journal Southeast Asian History*, vol. 3, no. 1 Maret 1962, hlm.. 86.

³W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, (Bandung : The Hague, 1956), hlm. 170 - 171.

Pax Neerlandica tersebut paling tidak menjadi penyebab utama dari adanya kemiskinan dan kebodohan yang menjadi gejala umum di masyarakat pada waktu itu.

Pemerintah kolonial selaku penguasa melakukan serangkaian tindakan yang wajar dilakukan oleh penguasa di mana pun, yaitu memproduksi hukum sebagai langkah politiknya supaya keberadaannya sebagai kelas atas terjaga stabilitasnya dan terganggu sedikit pun jangan sampai oleh adanya gerakan-gerakan sosial mau pun politik yang akan menghendaki perubahan-perubahan. Produk hukum itu antara lain berbentuk : *inlandsch onderwijs*¹, *godsdienstonderwijs (Mohammedaansch)*², dan *wilde scholen ordonantie*,³ sebagai bagian dari *onderwijspolitiek*-nya atas dasar semangat imperialisme dan kolonialisme.

Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial semata-mata diarahkan untuk kepentingan budaya elite masyarakat kolonial, di samping seakan-akan juga memperhatikan kesempatan pendidikan kepada pribumi. Pendidikan model seperti ini menitikberatkan pada pengembangan aspek kognitif, sementara aspek-aspek lain tidak begitu diperhatikan.

Muhammadiyah sebagai organisasi terpenting pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, khususnya organisasi Islam yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan, melaksanakan pendidikan dalam hubungannya dengan situasi politik, sosial, ekonomi dan budaya pada masa pra-kemerdekaan. Mulai awal pertumbuhannya arah gerak organisasi itu sudah tampak mengarah tidak hanya pada pembentukan norma semata, tetapi pembentukan nilai-nilai universal kemanusiaan pun juga sudah dijadikan sasaran arah perjuangannya.

Di tengah-tengah diberlakukannya pendidikan kolonial yang dikendalikan oleh sistem imperialisme, pendidikan Muhammadiyah yang lebih banyak dilaksanakan di pusat kelahirannya di Yogyakarta, tampil mengarah kepada pendidikan praktis melalui jalur non-formal *Hizb al-wathan*, pendidikan formal mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan tingkat pertama sampai pendidikan lanjutan tingkat atas, di samping pendidikan tradisional.

Bersama-sama dengan organisasi yang menitik beratkan gerakannya pada bidang pendidikan seperti Budi Utomo (1908), Taman Siswa (1922) dan organisasi lainnya, Muhammadiyah membuka sekolah-sekolah semisal *Standaardschool*, *Volkschool*, *Meisjes Kopschool*, *Schakelschool*, *HIS*, *MULO* dan *Kweekschool*.⁷ Selama kurang lebih 30 tahun mulai tahun

⁴Staatsblad van Nederlandsh Indie no. 125 th. 1893 dan no. 128 th. 1893.

⁵*Ibid.*, no. 550 th. 1905 dan no. 219 th. 1925.

⁶*Ibid.*, no. 494 th. 1923 dan no. 495 th. 1932.

⁷P.B. Muhammadiyah, *Verslag Muhammadiyah di Hindia-Timur* (Yogyakarta : P.B. Muhammadiyah, 1924), hlm. 16-20.

1912-1942 di beberapa pemukiman santri di kota Yogyakarta Muhammadiyah menekuni lapangan sosial dan pendidikan untuk anak-anak usia sekolah tanpa membedakan jenis kelamin, tingkatan sosial, ekonomi maupun asal usul keluarga. Usaha penyelenggaraan pendidikan semacam itu bersamaan dengan struktur sosial dengan pendidikan kolonial sebagai subsistemnya yang bermaksud melangsungkan struktur pemerintah kolonial. Lembaga-lembaga pendidikan Islam pada saat itu terlihat kurang mampu mengembangkan arah pendidikannya dikarenakan tidak adanya rumusan tujuan pendidikan secara jelas, ditambah dengan metoda pengajaran dan bahan pelajaran yang diterapkan tidak mendukung tujuan dan hakikat pendidikan.

Pendidikan Muhammadiyah sebagai salah satu nilai kemanusiaan dengan demikian menjelaskan orientasi sebenarnya dari organisasi tersebut, yang tidak hanya berorientasi norma, di samping adanya dasar semangat keagamaan yang mendorong para pemimpin karismatik pada periode itu yang telah menjalankan proses rasionalisasi untuk menjalankan perubahan-perubahan sosial. Dari sinilah tampak usaha Muhammadiyah sebagai organisasi agama yang bermaksud menegakkan nilai dan norma agama melalui pembentukan ideologi, budaya dan institusi yang berbeda dan bahkan berlawanan dengan struktur-struktur kolonial.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian dan penelaahan ini paling tidak diharapkan dapat bermanfaat untuk dua hal. Pertama, adanya hasrat untuk melihat Muhammadiyah melalui pendekatan historis, politis dan sosiologis. Hal ini dilakukan guna mengetahui teori-teori disiplin itu dapat menerangkan lebih analisis tipe organisasi dan orientasinya, tipe kepemimpinan dan bentuk gerakan Muhammadiyah. Di samping itu, juga untuk mengetahui seberapa jauh teori-teori berbagai disiplin itu dapat dipergunakan secara bersama-sama.

Ke dua, yang lebih bersifat praktis adalah untuk mengkaji makna penting pendidikan sebagai kunci kehidupan membangun kehidupan bangsa dan negara, terutama peran Muhammadiyah dalam hal ini. Selain itu sekaligus untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikannya di saat masyarakat terikat dalam hirarki sosial yang sangat ketat dan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah kolonial.

3. Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada teori politik yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan satu pemerintah yang begitu peka terhadap setiap bentuk gerakan yang bermaksud mengadakan perubahan-perubahan sosial, kepekaan terhadap aspek hukum yang mengabsahkan wewenangnya, sehingga setiap perubahan yang dimasukkan oleh kelompok di luarnya akan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan pidana, serta mobilitas sosial yang menjadikan orang luar menjadi orang dalam dan orang dalam menjadi orang

luar.⁸

Tipe ideal organisasi moderen sebagaimana dimaksudkan oleh Weber⁹ dicoba dipergunakan untuk mengamati keadaan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang antara lain untuk proses rasionalisasinya telah membagi peranan dan wewenang untuk dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan. Dikatakan juga bahwa, tipe itu harus memiliki aturan dan hukum yang mengatur kegiatan, keputusan-keputusan didasarkan atas landasan teknis organisasi dan bukannya pertimbangan pribadi, pencatatan tertulis semua kegiatan, penunjukkan pengurus atas dasar kemampuan-kemampuan tertentu, hubungan antar pemegang peran dijaga dan diatur atas dasar kewajiban yang telah disepakati, pemilihan aparat organisasi diputuskan atas dasar pekerjaan dan kedudukan yang pernah dijabat sebelumnya serta adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier dan jaminan keamanan kerja dengan cara memperoleh gaji atau pensiun.¹⁰

Kepemimpinan karismatik¹¹ yang menekankan kesalehan, penuh semangat pengorbanan dan tingkat integritas kepribadian yang tinggi sehingga dapat dijadikan contoh teladan oleh para anggotanya, dipergunakan untuk menjelaskan 4 pimpinan periode 1912-1942 yang semuanya bergelar Kiyai dan Haji.

Konsep pendidikan menurut Frederik Mayer yang menekankan maknanya sebagai proses menuju upaya pencerahan umat manusia baik formal maupun non-formal guna menumbuhkan kekuatan intelektual, kesiapan emosi dan kesadaran etis¹², dipakai untuk mencermati usaha pendidikan Muhammadiyah dan rumusan tujuannya yang hendak dicapai melalui jenjang-jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Bentuk-bentuk pendidikan dan yang melatarbelakangi didirikannya diupayakan didekati dengan teori Julius Menacker dan Pollack. Teori itu menyebutkan bahwa, satu bentuk gerakan yang bermaksud menolak satu budaya yang telah ada dengan cara membangun struktur budaya yang serupa meskipun dengan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa unsurnya merupakan satu gerakan budaya tandingan¹³, begitu pula

⁸Gaetano Mosca, *The Ruling Class*, trans. by Hannah Kahn (New York : McGraw-Hill, 1939), hlm. 281 - 286. Gerhard E. Lenski, *Power and Privilege*, (New York : McGraw-Hill, 1966), hlm. 13 - 14.

⁹Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. H.H. Gerth and C. Wright Mills (New York : Oxford University Press, 1946), hlm. 329-341.

¹⁰Marvin E. Olsen, *The Process of Social Organization* (New Delhi : Rekha Pvt.Ltd. , 1968) hlm. 297.

¹¹*Op.cit.*, hlm. 328.

¹²Frederik Mayer, *A History of Educational Thought* (Ohio : Merrills Book, 1966), hlm. 7.

¹³Julius Menacker and Erwin Pollack (ed.), *Emerging Educational Issues* (Canada : Little Brown and co, 1974), hlm. 275 - 276.

dalam hal ideologi dan institusi. Beberapa amal usaha di bidang sosial, kesejahteraan seperti lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit dan organisasi kepanduan serta peran serta Muhammadiyah di dalam pergerakan nasional dianalisis dengan cara-cara seperti disebut di atas.

Motivasi para pemimpin Muhammadiyah dan warganya dalam usaha-usahanya itu dijelaskan dalam kaitannya dengan bagian dari pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Weber menyebutkan bahwasanya terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perjuangan dan pengorbanan tenaga dan pikiran, waktu dan kekayaan yang itu diikuti dengan do'a, dalam rangka pengabdian seseorang kepada Tuhan.¹⁴

Untuk melihat lebih jauh kebersamaan di antara para pimpinan dan sesama anggota Muhammadiyah, maka kekuatan ajaran agama Islam yang tampak menjiwai konsolidasi spritual di dalamnya, dirasa akan dapat memberi kemungkinan analisis yang lebih mendalam mengenai kehidupan keseluruhan yang terjadi antara tahun 1912 - 1942 itu.

4. Analisis

Pemerintah kolonial Belanda sebagai pendukung dan penganut imperialisme selalu berusaha membangun imperium di bawah satu kekuasaan politik, sosial, sosial-ekonomi dan kebudayaan. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak daerah koloninya selain Suriname dan Curacao, yang hendak dikuasai dengan semboyan indah *Pax Neerlandica*.

Di Indonesia kekuasaan pemerintah kolonial itu diwakili dengan penunjukan seorang Wali Negara atau *Landvoogd* yang berpangkat Gubernur Jenderal yang dibantu oleh tidak kurang dari 8 kepala Departemen yang berpangkat Direktur. Terhitung mulai tanggal 27-7-1897 sampai dengan 1-8-1901 penguasaan atas Indonesia itu diawasi secara langsung oleh J.T. Craemer selaku Menteri Urusan Daerah Jajahan yang memimpin *Departement van Kolonien*.¹⁵ Departemen ini hingga tahun 1941 dipegang oleh 19 Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Ratu Belanda yang dibantu oleh *Staten Generaal*, *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*.

Di bawah koordinasi Gubernur Jenderal, 8 Departemen di Indonesia (Kehakiman, Keuangan, Pemerintahan dalam Negeri, Urusan Ekonomi, Perhubungan dan Pengairan, Penerangan, Angkatan Laut dan Pendidikan, Agama dan Kerajinan)¹⁶ itu merupakan satu pemerintahan yang mewakili dan mencerminkan budaya politik penguasa di wilayah jajahan. Di dalam keadaan

¹⁴Max Weber, *The Sociologi of Religion*, trans. by Ephraim Fischhoff, (London, London 1965), hlm. 60 - 94.

¹⁵S.L. van der Wall, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, terj. Sumarsono Mestoko dan Ahmad Dasuki, (Jakarta : Depdikbud, 1977), hlm. v

¹⁶*Ibid.*, hlm. vi

semacam ini masyarakat kemudian terbagi menjadi dua yaitu masyarakat penjajah dan masyarakat terjajah.¹⁷ Khusus Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan yang pada tahun 1912 berubah namanya menjadi Departemen Pendidikan dan Agama, terhitung mulai tahun 1900-1940 pergantian Direktornya sebanyak 17 kali. Pemegang jabatan Direktur yang pertama adalah Mr. J.H. Abendanon (4-3-1900 sampai 4-3-1905) dan yang terakhir kalinya adalah Prof. Dr. Pangeran A. Hoesin Djajadiningrat (15-5-1940 sampai 28-5-1941).¹⁸

Rekrutmen politik dijalankan dengan baik oleh pemerintah kolonial untuk kelangsungan dan keamanan pemerintahannya. Penunjukkan Hoesin Djajadiningrat dengan demikian merupakan satu cara untuk memperoleh pengakuan atas kekuasaannya baik melalui basis formal maupun basis moral. Pemerintah kolonial dalam hal ini secara cermat mengoperasikan fungsi penarikan orang luar, dalam hal ini kalangan pribumi yang terjajah, menjadi orang dalam. Secara moral masyarakat terjajah hendak diminta pengakuannya untuk menerima kebaikan dari pemerintah penjajah yang sudah berbaik hati mempekerjakan salah seorang dari bangsanya. Perkiraan dan perhitungan penguasa yang menganggap bahwa yang bersangkutan sudah tidak mementingkan akar kebudayaannya sendiri dan telah membentuk dirinya dengan nilai-nilai Barat, yang mungkin atau sudah dapat dipastikan bersedia bekerjasama dan menguntungkan pembentukan budaya minoritas yang berkuasa bisa saja keliru dan tidak mengena, meski bisa pula sebaliknya.

Dari Departemen yang salah satu Direktornya berasal dari kalangan pribumi, sebagian perumusan dan pelaksanaan politik pemerintah dijalankan, sebagai usaha penanaman atau pembudayaan jiwa dan semangat masyarakat penjajah. Berbagai peraturan dan hukum diterbitkan dan dibakukan untuk kepentingan pengabsahan wewenangnya, dan sekaligus untuk menjaga jangan sampai muncul gerakan-gerakan yang bermaksud mengadakan perubahan-perubahan sosial. Pemerintah kolonial memiliki keengganan yang amat besar terhadap gerakan-gerakan yang mengarah pada maksud-maksud seperti itu, khususnya pada pergerakan-pergerakan nasional.

Ordonansi pendidikan Islam (*Godsdienstonderwijs*)¹⁹ yang diterbitkan pada tahun 1905 nomor 550, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh J.B. Van Heutsz selaku Gubernur Jenderal dan De Groot sebagai Sekretaris umum II tertanggal 2 November, menunjukkan salah satu kebiasaan penguasa kolonial yang lain dalam hal produk hukum. Peraturan yang khusus dipergunakan untuk mengatur masalah pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam, dan merupakan politik pendidikan kolonial ini pun merupakan

¹⁷Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 86.

¹⁸Van der Wall, *op.cit.*, hlm. 215.

¹⁹Staatsblad, *op.cit.*, th. 1905, 1923, 1925, 1932.

perwujudan sikap keengganan pemerintah kolonial terhadap adanya maksud perubahan-perubahan sosial. Begitu pula ordonansi nomor 494 tahun 1923 yang berkaitan dengan *wilde schoolen ordonantie*, ordonansi nomor 219 tahun 1925 yang memuat masalah *goeroe ordonantie*, serta ordonansi nomor 495 tahun 1932. Peraturan-praturan itu menunjukkan kepekaan yang tinggi pemerintah kolonial, yang tidak menghendaki adanya perubahan status masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang berdaulat dan merdeka, bebas dari campurtangan bangsa asing.

Peraturan-peraturan itu kemungkinan diterbitkan atas dasar kekuatiran dari pemerintah kolonial terhadap gerakan-gerakan nasional yang menghendaki adanya perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan, baik politik, sosial, sosial-ekonomi maupun budaya. Ordonansi nomor 550 tertanggal 2 November 1905 berlaku untuk seluruh wilayah pulau Jawa, kecuali Yogyakarta dan Surakarta. Isinya secara garis besar meliputi ; ketentuan bagi seorang guru agama Islam yang harus memiliki izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati atau Patih, jika hendak mengajar. Guru yang sudah memperoleh izin masih juga diwajibkan mencatat nama-nama murid dan mata pelajaran yang diberikan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini berakibat berupa hukuman penjara delapan hari atau paling sedikit satu hari, atau membayar denda minimal satu gulden dan paling banyak dua puluh lima gulden. Perubahan sebagian materi ordonansi ini terjadi pada tahun 1925 dengan diterbitkannya ordonansi nomor 219 tertanggal 14 Mei, yang disebut pula dengan "Goeroe-Ordonantie 1925", dan berlaku di samping untuk Jawa juga untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura.²⁰

Ordonansi nomor 219 tahun 1925 itu sudah tidak mengharuskan adanya izin tertulis bagi seorang guru yang hendak mengajar, tetapi cukup mengirim pemberitahuan saja. Ketentuan pengganti ini tetap tidak menghilangkan kesan bahwa pemerintah kolonial masih saja kuatir terhadap usaha pergerakan nasional, khususnya yang diselenggarakan oleh umat Islam melalui lapangan pendidikan. Kalau pada produk hukum yang pertama surat izin merupakan salah satu keharusan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh guru-guru agama Islam di Jawa kecuali Yogyakarta dan Surakarta dan berlaku pula untuk Madura, maka produk hukum tahun 1925 itu menyebutkan tidak perlu memilikinya, tetapi cukup pemberitahuan. Kesan sepintas adanya penggantian itu seakan-akan memberikan kemudahan dan kelonggaran, pada hal sebenarnya tidak. Daerah-daerah yang menurut ordonansi tahun 1905 tidak terkena peraturan, yaitu daerah-daerah di luar Jawa, menurut ordonansi 1925 menjadi daerah yang dijadikan sasaran ordonansi itu.

Adanya perubahan surat izin menjadi pemberitahuan, tetapi kemudian jangkauan wilayahnya menjadi lebih luas, terkesan bukan merupakan sikap

²⁰Staadsblad, *Op.cit.*, tahun 1925, hlm. 1-4.

terbuka dan pemberian kelonggaran, bahkan sebaliknya. Guru-guru agama yang dikirim oleh Muhammadiyah ke luar Jawa dan merupakan lulusan sekolah formal khusus calon guru dan sekolah calon pemimpin, dengan demikian merasa berat dengan tugas-tugas mengajar dan semakin berat pula dengan tugas-tugas kemasyarakatan yang lainnya.

Ordonansi-ordonansi, baik itu yang dikeluarkan pada tahun 1905, 1925 maupun tahun-tahun sebelumnya itu merupakan bagian dari politik pendidikan pemerintah kolonial yang dibungkus dengan dalih keamanan dan ketertiban. Demi alasan itu pula diterbitkan lagi ordonansi yang berkaitan dengan pendirian dan pelaksanaan pendidikan oleh satu institusi. Peraturan itu tertuang pada ordonansi nomor 494 dan 495 tahun 1932, yang tampaknya merupakan penyempurnaan dari ordonansi tahun 1923 tentang sekolah-sekolah liar.²¹ Semua ketentuan hukum tersebut hampir dapat diperhitungkan semakin memberatkan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam khususnya, dan juga oleh lembaga-lembaga pendidikan yang berdasarkan semangat nasionalisme, seperti Taman Siswa dan Budi Utomo.

Sekolah-sekolah negeri yang dalam penerimaan muridnya mengacu kepada pasal 6 - 10 Algemene Bepalingen van Wetgeving tahun 1848,²² berakibat menjadikan sistem pendidikannya sangat diskriminatif. Menurut ketentuan ini murid-murid dikelompokkan menjadi kelompok Eropa dan Bumiputera.²³ Perkembangan dari peraturan itu terjadi pada tahun 1845 dengan dikeluarkannya pasal 109 di dalam Regerings Reglement yang menyangkut pembagian warga masyarakat tetap juga menjadi Eropa dan Bumiputera dengan tidak lagi menjadikan ukuran agama sebagai pemisahannya.²⁴

Pendidikan untuk anak-anak Eropa terdiri dari pendidikan dasar maupun menengah dalam bentuk : E.L.S. (Europese Lagere School), yang terbagi menjadi eerste Europese Lagere School A dan B serta Tweede Europese Lagere School. Di Yogyakarta sekolah jenis ini pernah ada sebanyak 3 sekolah di jalan Ungaran, jalan Senopati dan jalan Lempuyangan Wangi.²⁵

Pendidikan dasar bagi anak-anak Bumiputera terbagi menjadi: Eerste Hollands Inlands School dan Tweede Hollands Inlands School.²⁶ Yogyakarta memiliki H.I.S. jenis ini hingga tahun 1942 sebanyak 2 sekolah, yang salah

²¹Staadsblad, *op.cit.*, tahun 1923 dan 1925.

²²Van der Wall, *op.cit.*, hlm. 214-215.

²³*Ibid.*, hlm. 93 - 100.

²⁴Regerings Reglement, pasal 109 tahun 1845 dan Algemene Bepalingen van Wetgeving pasal 6-10 th. 1848.

²⁵Wawancara dengan H.M. Mawardi dan Amin Syahri pada 10 Desember 1988.

²⁶Staadsblad, *op.cit.*, nomor 125 tahun 1829.

satunya berada di jalan Cemorojajar no. 1. Sementara H.I.S. kelas 2 sebanyak 5 sekolah.²⁷ H.C.S (Hollands Chinese School) merupakan sekolah yang didirikan khusus untuk anak-anak Cina, sebagai imbalan bahwa mereka itu dianggap sebagai pembayar pajak yang baik. Selain sekolah-sekolah tingkat dasar, pemerintah kolonial membangun sekolah tingkat menengah, baik untuk kalangan Eropa sendiri maupun untuk orang-orang Bumiputera dan orang-orang Cina. MULO (Middelbare uitgebreid Lager Onderwijs), Kweekschool dan H.C.K. (Hollands Chinese Kweekschool) merupakan lembaga pendidikan tingkat lanjutan tingkat pertama dan A.M.S (Algemene Middelbare School) sebagai tingkat kelanjutannya.

Pengajaran agama khususnya di sekolah-sekolah dasar sejalan dengan artikel 5 pada Lembaran negara nomor 125 tahun 1892 yang dikeluarkan oleh Ratu Emma atas nama Ratu Wilhelmina tertanggal 28 September 1892, dilarang untuk diberikan.²⁸ Dua keuntungan dengan adanya pelarangan ini adalah pertama, peniadaan pengajaran agama Islam terutama menjadi sah. Ke dua, setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintah. Seandainya di sekolah-sekolah jenis ini pelajaran agama Kristen diberikan, bukannya sikap simpati dari umat Islam yang diperoleh, melainkan justru sebaliknya. Penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam selalu dijadikan sasaran pendidikan Missie dan Zending, terutama dalam rangka usaha perluasan agama Katolik.²⁹

Sekolah-sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak-anak pamongpraja dipersiapkan untuk mengisi kepegawaian di kantor-kantor pemerintah. Bahasa Belanda dipergunakan sebagai ukuran prestasi dan kualitas penentuan berhasil atau gagalnya seseorang di dalam menempuh ujian, dan persyaratan dapat diterimanya menjadi pegawai baik di lingkungan pemerintah maupun pertikelir. Di sekolah-sekolah pemerintah pelajaran ilmu bumi dan sejarah Belanda diberikan dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan ilmu bumi dan sejarah Indonesia.³⁰ Pendidikan kolonial dimaksudkan untuk usaha penyediaan pegawai-pegawai rendahan (juru tulis, klerk, mantri kabupaten, dsb.).³¹ Selain itu kepada murid-murid sekolah ditanamkan pengertian bahwa Eropa atau dunia Barat pada umumnya, dan Belanda khususnya jauh lebih baik, lebih besar dibandingkan dengan Indonesia.³²

²⁷Wawancara, *op.cit.*

²⁸*Staadsblad, ibid.*, nomor 125 tahun 1892.

²⁹Abdurrahman Suryomohardjo, *Kota Yogyakarta 1880-1930*. Disertasi 1988 tidak diterbitkan.

³⁰Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 1981) hlm. 27.

³¹Sutedjo Bradjanegara, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta, 1958), hlm. 58.

³²Pengkisahan Ibu Sulastin, Dosen Sastra UGM Yogyakarta, pada kuliah semester I di Fak. Pasca Sarjana UGM tahun 1986.

Menghadapi sekolah-sekolah pemerintah kolonial dan orientasinya, beberapa organisasi non-pemerintah berupaya membangun sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatannya. Di antaranya adalah sekolah Kasultanan yang pada tahun 1890 sudah memiliki murid sebanyak 100. Sekolah ini disebut dengan Klasse School met de Basa Kedaton.³³ Pakualaman pada abad ke-20 telah mempunyai 2 sekolah yaitu Suryengjurit dan Padmasekaran.³⁴

Di tengah-tengah persaingan penyelenggaraan sekolah di Yogyakarta, maka politik pendidikan pemerintah kolonial memberi subsidi kepada sekolah-sekolah Kristen yang masih mempertimbangkan asal kebangsaan dan keturunan siswa.³⁵ Pengajaran di sekolah-sekolah itu hanya merupakan pematik, sebagai percobaan untuk dapat berhubungan dengan penduduk setempat yang makin merupakan sasaran perluasan agama itu.³⁶ Jumlah murid-murid pada sekolah-sekolah di Yogyakarta pada tahun 1923 dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

Sekolah	milik	Jumlah murid
E.L.S	Netral	155
	Protestan	260
	Katolik	337
H.I.S.	Pemerintah	843
	Netral	498
	Protestan	660
2de Klasse Inlandse School	Katolik	761
	Pemerintah	2571
	Netral	0
	Protestan	243
	Katolik	764
	Muhammadiyah	756
	Budi Utomo	194
	Serikat Islam	120

Sumber : Java Pos, 7 September 1923.³⁷

³³ Abdurrachman, *op.cit.*, hlm. 74-75.

³⁴ Suratmin, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa*, (Yogyakarta : P&K, 1981), hlm. 11 dan 67.

³⁵ Abdurrachman, *op.cit.*, 87-93.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

³⁷ Abdurrachman, *op.cit.*, hlm. 87-93.

Pendidikan kolonial yang berlatarbelakang kebudayaan Belanda, pada prakteknya tidak dapat melepaskan diri dari sikap memihaknya terhadap agama Kristen.³⁸ Perluasan kolonial dan ekspansi agama merupakan gejala simbiose yang saling menunjang.³⁹ Zending Kristen harus dianggap sebagai faktor penting bagi proses penjajahan.⁴⁰ Penyebaran agama Kristen, dengan demikian, di Hindia Belanda harus berjalan seiring dengan perluasan penjajahan.⁴¹

Gerakan nasional yang diperjuangkan oleh Taman Siswa, Muhammadiyah, Budi Utomo dan organisasi lainnya merupakan satu fenomena historis dari perjuangan membangun Indonesia merdeka melalui sisi sosial budaya. Penyelenggaraan pendidikan oleh pergerakan-pergerakan itu dengan demikian di samping merupakan reaksi atas adanya politik dan sistem pendidikan kolonial, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan nasional secara keseluruhan. Fenomena sejarah tersebut merupakan akibat dari berbagai situasi pada zamannya, baik itu secara politik, sosial-ekonomi, sosial maupun budaya.⁴² Berbeda dengan Muhammadiyah yang mendirikan sekolah atas dasar agama, maka organisasi-organisasi lain itu mendasarinya dengan asas kebangsaan dan kebudayaan.

4.2. Analisis tipe ideal dan birokratisasi organisasi.

Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 12 Nopember 1912 oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta merupakan satu organisasi Islam yang bergerak di bidang da'wah, sosial dan pendidikan. Organisasi kota ini menempatkan diri sebagai penyebar kebudayaan Islam dan pikiran-pikiran non-politis, yang dengan sendirinya berusaha menjauhi kegiatan politik praktis. Para anggotanya diberi kebebasan atas tanggungjawab pribadi untuk berkecimpung di lapangan politik.⁴³

Beberapa sekolah yang dirintis pendiriannya, begitu pula dengan poliklinik, panti asuhan, organisasi kepanduan untuk angkatan muda terasa mengesankan bahwa itu semua dilakukan sebagai gerakan budaya tandingan. Kegiatan-kegiatan itu serupa sebagaimana yang juga dilakukan oleh penyebar

³⁸*Ibid.*, hlm. 93.

³⁹H. Kraemer, "De Zending en Nederlands Indie", dalam H. Baduet I.J. Brugmans, *Balans vaan Beleid*, 1961, hlm. 294, dalam Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 18.

⁴⁰Alb. C. Kruyt, "De Inlandsche Staat en de Zending", dalam *Indisch Genootschap*, 23 Oktober 1906, hlm. 96, di dalam Aqib Suminto, *loc.cit.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 18 -19.

⁴²Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 69-76.

⁴³George Mc Turman Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (New York : Cornell University Press, 1961), hlm. 87.

agama Masehi,⁴⁴ dan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Ahmad Dahlan seorang yang begitu percaya pada pikiran-pikiran Islam yang dapat mengatasi setiap persoalan. Gerakan pembaharuannya diawali dengan memusatkan perhatiannya pada usaha pendidikan dan pelayanan sosial masyarakat.⁴⁵

Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya dan 3 penerusnya kemudian memilih aspek-aspek sosial sebagai bidang gerak dan perjuangannya di dalam membangun semangat nasionalisme. Bersama-sama dengan Budi Utomo dan Taman Siswa yang juga bergerak di lapangan yang sama, Muhammadiyah menekuni pengabdian kepada masyarakat mengembangkan nasionalisme sebagai tandingan ideologi kolonialisme yang diterapkan oleh pemerintah penjajah. Ke tiga organisasi tersebut merupakan gerakan nasionalisme yang memilih aspek sosial sebagai lapangan pengabdian dan perjuangannya.⁴⁶ Tujuan untuk memperjuangkan dan memperoleh satu ideologi, bebas dari kolonialisme termasuk bidang orientasi nilai.⁴⁷

Muhammadiyah memilih berbagai cara untuk memperoleh ideologi tersebut. Di antaranya dengan menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. kepada penduduk Bumiputera, di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya, seperti terlihat pada rumusan tujuan di periode pertumbuhannya.⁴⁸

Usaha yang lebih terinci untuk hal itu diupayakan dengan; melakukan penyiaran agama, memajukan pengajaran dan pendidikan umat Islam, mengurus dan memajukan pertolongan umum, dan melakukan pergaulan hidup secara Islam, menerbitkan surat bacaan dan kitab-kitab agama bagi umat Islam dan mendirikan atau membantu berdirinya masjid-masjid atau rumah-rumah wakaf.⁴⁹

Faktor keberhasilan memperjuangkan tujuan organisasi pada tahun 1912-1942 salah satunya adalah tipe kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh pimpinan puncak pada periode itu. K.H. Ahmad Dahlan (1912-1923), K.H. Ibrahim (1923-1932), K.H. Hisjam (1932-1936) dan K.H. Mas Mansoer (1936-1942)⁵⁰ merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ahli agama dan dengan dasar itu mereka mampu memberikan pengabdian kepada aga-

⁴⁴Kraemer, *De Islam als Godsdiëntig en Zendingprobleem* (The Hague : Boekcentrum, 1938), hlm. 286-287.

⁴⁵Kahin, *op.cit.*, hlm. 86-87.

⁴⁶Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 69-76.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁸PB Muhammadiyah, *Verlag Moehammadijah di Hindia Timur* (Yogyakarta: PB. Moehammadijah, 1924), th.ke-X, hlm. 20.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 19 - 20.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 14 - 19.

ma dengan cara-cara yang luar biasa. Mereka berempat merupakan pemimpin yang berpredikat Kyai Haji yang alim dan saleh dalam laku keagamaannya. Dibantu oleh beberapa orang yang menempati jabatan kepengurusan sesuai dengan tata kerja menurut organisasi moderen, para pemimpin itu menjalani masa baktinya dengan menempuh rasionalisasi di berbagai hal. Rasionalisasi untuk mencapai tingkat kesalehan dilakukan di bidang sosial dan budaya, dengan cara mendirikan sekolah-sekolah, klinik atau rumah sakit, gerakan kepanduan, perpustakaan, penerbitan, dlsb.

Mulai awal berdirinya di lingkungan Muhammadiyah sudah terbiasa adanya pembagian tugas dengan peran masing-masing yang berbeda. Fungsi pemuka, penulis dan pemeriksa dengan bagian-bagian yang dikoordinasikan oleh pengurus harian merupakan kehidupan keorganisasian yang rasional dalam upaya mencapai tujuan bersama. Bagian-bagian yang pernah diganti dengan sebutan urusan dan pada tahun 1926 disebut dengan nama majelis itu antara lain : 'Aisyiah, pemuda, pengajaran, tabligh, taman pustaka, dan penolong kesengsaraan umum (P.K.U.).⁵¹ Birokratisasi dalam pengertian proses rasionalisasi satu organisasi sosial supaya kegiatannya meningkat, dan agar lebih secara efektif dan efisien tercapai tujuannya telah tampak pada 30 tahun pertama itu.

Rasionalisasi pencapaian tujuan itu di samping ditempuh oleh Muhammadiyah melalui bidang pendidikan baik formal, non-formal maupun tradisional (sekolah-sekolah, gerakan kepanduan Hizb al-wathan, ceramah-ceramah agama), juga dilaksanakan dengan menerbitkan majalah Suara Muhammadiyah, membangun rumah sakit P.K.U., membangun panti asuhan untuk anak laki-laki maupun perempuan, mendirikan perpustakaan dan ketertiban organisasi.⁵²

Mulai tahun 1912 di lingkungan Muhammadiyah pembagian tugas dan peranan, aturan dan ketentuan yang menuntun kegiatan, keputusan atas dasar teknis organisasi, dokumentasi hampir semua kegiatan, pemilihan pengurus atas dasar keahlian, pembatasan hubungan dan penjagaan peran didasarkan kepada tata kerja masing-masing, penunjukkan sebagai pimpinan dipertimbangkan berdasarkan jabatan sebelumnya dan adanya kesempatan peningkatan karier, telah diberlakukan. Tipe ideal dan birokratisasi organisasi⁵³ yang harus memenuhi beberapa ketentuan tertentu, dengan demikian layak

⁵¹Hoofdcomite Congres Moehammadijah, *Boeah Congres 23* (Yogyakarta : Persatuan, 1938), hlm. 8-9.

⁵²*Ibid.*, hlm 7 - 10. H.B. Muhammadiyah, *Boeah Congres ke XVIII* (Yogyakarta : Persatuan, 1927), hlm. 6-7. PB. Muhammadiyah, *Berita Tahunan Muhammadiyah di Hindia-Timur* (Wetevreden: Landsdrukerij, 1927), hlm. 30.

⁵³Marvin e.Olsen, *The Process of Social Organization* (New Delhi : Rekha Pvt.Ltd., 1968), hlm. 297. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* trans. H.H. Gerth and C. Wright Mills (New York; Oxford University Press, 1946), hlm. 329-341.

disandang oleh Muhammadiyah, ditambah dengan diterapkannya proses rasionalisasi di dalamnya. Persyaratan tipe ideal sebuah organisasi secara keseluruhan oleh Muhammadiyah memang belum semuanya terpenuhi, yaitu terutama yang menyangkut penggajian maupun jaminan keamanan yang berupa pemberian pensiun.

4.3. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah

K.H. Ahmad Dahlan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada murid-muridnya selain di rumahnya sendiri juga di kampung-kampung di Yogyakarta dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Ahmad Dahlan oleh murid-muridnya lebih akrab dipanggil dengan sebutan Ketib Amin, satu panggilan yang dikaitkan dengan kedudukannya sebagai *ketib* kraton Yogyakarta dengan gelar Kyai Anom.

Dia seorang guru yang sabar, halus, dan ulet, di samping luas ilmunya. Sekolah kyai yang dibentuk sebelum Muhammadiyah didirikan, samahalnya dengan pendidikan tradisional yang dibinanya seperti ; *Wa al-Asri, Fathu al-asror Miftah al-saadah* (F M) di Kauman dan Suronatan, *Sumarah Allah* di Notoprajan, *Qoyyumu al-Islam* di Purwodiningratan, *Taqwimu al-din* di Ngupasan, Budi Islam di Ngadiwinatan, Mardi Islam di Sosromenduran, *Krido Agomo* di Blunyah, A.D.K. di Yudonegaran, *Hambudi Suci* di Langenastran, *Fathu al-islam* di Sompilan, *Sarekat al-mubtadi* di Kotagede, *Maduroro* di Blunyah, *Marditomo Wanito* di Kadipaten, *Hayatu al-Qulub Wanito* di Suronatan, *Wanito Mulyo* di Karangakajen, dan S.A.T.V di Surakarta.⁵⁴ Di dalam pendidikan jenis ini metode ceramah menjadi warna pokok, mesti murid perorangan yang berminat tetap dilayani. Murid pendidikan tradisional tidak dikelompokkan menurut jenis kelamin secara ketat. Jumlah per kelompok tidak lebih dari 20 orang dengan jam belajar pada pagi hari sehabis sholat subuh atau petang hari antara jam 19.00-21.00.

Di tengah-tengah perjuangan dengan berbagai hambatan pada tahun 1924 Muhammadiyah telah memiliki 4 lembaga pendidikan formal taman kanak-kanak. Ke empatnya berada di Kauman, Suronatan, Notoprajan dan Karangakajen. Nama khusus pendidikan ini adalah Bustan al-athfal, yang berarti kebun anak-anak.⁵⁵

Bagian sekolah Muhammadiyah di tingkat pusat di Yogyakarta memiliki dua macam pendidikan formal untuk sekolah dasar yaitu : Sekolah angka 2 yang tingkat dan materinya sama dengan sekolah pemerintah kelas 2, dan sekolah angka 1 yang tingkat dan materinya sama dengan H.I.S. kelas 1 dan 2, ditambah dengan pelajaran agama Islam. Pemukiman-pemukiman santri di

⁵⁴PB. Muhammadiyah, *verslag*, *op.cit.*, hlm. 51-63.

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Haringah (66 tahun), guru TK Bustan al-athfal Karangakajen tahun 1938-1940.

Yogyakarta yang telah memiliki sekolah jenis ini antara tahun 1912-1942 adalah Suronatan, Karangajen, Bausasran dan Kotagede.⁵⁶ Kehidupan di kota sebagai pusat kekuasaan dan ekonomi tampak lebih memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan baru. Perubahan sosial yang terjadi lebih cepat dibandingkan di desa-desa, dan itu terlihat dengan adanya sekolah-sekolah, pelebaran jaringan kerja, mobilitas penduduk, munculnya organisasi dan partai, dan surat kabar.⁵⁷ Sampai tahun 1923 sekolah ini berjumlah :

No	Kampung/lokasi	Jumlah	Jenis	Murid	Guru
1	Suronatan	1	2/5 kelas	376	13
2	Karangajen	1	2/5 kelas	115	6
3	Bausasran	1	2/4 kelas	157	6
4	Kotagede	1	2/4 kelas	146	6
5	Ngabean	1	1	150	6
Jumlah		5	14 kelas	944	37, ⁵⁸

Pendidikan dasar formal tersebut sebelum tahun 1934 memakai nama Belanda seperti : *Volkschool*, *Schakelschool*, *Vervolgschool*, *Standaardschool* atau *H.I.S.*, tetapi semenjak tahun 1934 nama-nama itu diganti dengan nama-nama Indonesia.⁵⁹ Kemudian pada tahun 1932 dari jumlah *H.I.S.* Muhammadiyah yang berjumlah 69,3 di antaranya berada di Yogyakarta, dan dari 25 *Schakelschool* 1 berada di Yogyakarta, *Standaardschool* tetap 5, sementara dari 26 *Volkschool* 6 sekolah berada di Yogyakarta. Murid-murid sekolah ini berasal dari kelas menengah pada kebanyakannya, meskipun anak seorang Bupati Bantul pernah pula menjadi salah seorang muridnya.⁶⁰ Guru-gurunya pun semuanya dari kelas yang sama dan sebagian kecil menerima surat keputusan dan gaji dari pemerintah Belanda.⁶¹ Mereka ini adalah pemegang ijazah *MULO HIK* dan tidak hanya berasal dari anggota Muhammadiyah tetapi termasuk para simpatisannya, bahkan bukan pula dari golongan santri.⁶²

Murid-murid sekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah

⁵⁶PB. Muhammadiyah, *verslag*, *op.cit.*, hlm. 54.

⁵⁷Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 103-105.

⁵⁸PB. Muhammadiyah, *Verslag ke X*, *op.cit.*, hlm. 54.

⁵⁹PB. Muhammadiyah, *Verslag*, *op.cit.*, hlm. 16.

⁶⁰Wawancara dengan HM Mawardi, *op.cit.*, dan Ibu Badilah Zubeir (84 tahun).

⁶¹HM. Mawardi, *ibid.*

⁶²*ibid.*

rupa-rupanya sengaja tidak diarahkan untuk menjadi pegawai, sehingga kebanyakannya setelah tamat memilih menjadi pedagang, atau melanjutkan ke pondok-pondok pesantren. Pada sekolah-sekolah dasar seperti ini murid-murid diharuskan membayar f 3 paling banyak atau menurut kemampuan orang tuanya, sementara para gurunya menerima gaji f 50.

Di Yogyakarta pada bulan Agustus 1937⁶³ didirikan MULO Bumiputera dengan subsidi pemerintah. Jenjang pendidikannya sejajar dengan sekolah kejuruan yang masa belajarnya 3 tahun seperti H.B.S. 3 tahun. Sementara itu, Konperensi bagian sekolahan Muhammadiyah seluruh Jawa yang berlangsung pada bulan Nopember 1930, pada bulan Juli 1931 dibuka MULO HIK lengkap dengan asramanya.⁶⁴ Berdirinya sekolah ini tidak terlepas dari dukungan para pedagang dan pengusaha batik warga Muhammadiyah yang peka dan terbuka terhadap jasa-jasa pendidikan, ditambah dengan jiwa dan semangat berkorban menurut keyakinan agamanya.

MULO Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta, selain Kweekschool, dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan yang lebih tinggi. Sehingga pelajaran yang diberikan meliputi ; sejarah, kimia, ilmu pasti, antropologi, bahasa Belanda, Inggris, biologi, ilmu mendidik dan ilmu jiwa. Tercatat pimpinannya yang pertama adalah Suratini Sosrosugondo yang kemudian digantikan oleh Malikus. Sekolah ini semula berada di Ketanggungan, kemudian pindah ke Bintaran dan pada akhirnya menetap di Gondomanan, pada tahun 1938.⁶⁵

Pendidikan sekolah menengah tinggi khusus calon pemimpin (Mu'allimin), mula-mula berasal dari keinginannya mendirikan sekolah kyai Dibukanya untuk kepentingan pendidikan untuk anak-anak muda itu, baik laki-laki maupun wanita, di rumahnya sendiri di Kauman di sekitar tahun 1918.⁶⁶ Sekitar 18 murid pertamanya dididik pada pendidikan ini, yang terdiri dari : Aslam, Bajuri, Hilal, Daroni, Djuraimi, Badillah, Amanah, Hayyinah, Umayah, Wasilah, Bustanah, Bariyah, Dawimah, Wakirah, Aisyah, Dalalah, Wardiyah dan Wardiah.⁶⁷ Murid yang berasal dari pengusaha batik diminta membayar 1 gulden dan yang dari priyayi kraton f 0.50 atau hanya 0.25 gulden.⁶⁸ Pada perkembangannya kemudian, masih di tahun yang sama pendidikan ini secara resmi diberi nama *Al-Qismu al-arqo* yang berarti sekolah menengah tinggi. Pelajaran yang diberikan meliputi; ilmu agama (fiqh,

⁶³Van der Wall, *op.cit.*, hlm. 103.

⁶⁴Majelis Pengajaran dan Pendidikan Muhammadiyah, *Berita Pengajaran Muhammadiyah Hindia Timur 1930* (Yogyakarta: 1930), hlm. 4 - 10.

⁶⁵Wawancara Ibu Badillah, *op.cit.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*, wawancara dengan Ibu Amanah (80 th) dan H. Djuraimi (86 th).

⁶⁸*Ibid.*

hadits, tafsir Al-Qur'an, Qiro'ah, sejarah nabi, dan sejarah Islam, tauhid dan akhlaq), dan bahasa Arab (grammatika, baca tulis, dan mengarang).⁶⁹ Nama itu bertahan sampai tahun 1921 karena pada hari Kamis tanggal 8 Desember 1921 nama Al-qismu al-arqo diganti menjadi Pondok Muhammadiyah.⁷⁰

Murid-muridnya berasal dari Yogyakarta, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, Purwokerto dan Wonogiri. Jumlah semuanya pada saat itu sebanyak 20 siswa.⁷¹ Pada tahun 1926 ketika sekolah ini pindah ke Ketanggungan dari Kauman, bersamaan dengan itu namanya pun berubah menjadi Kweekschool Muhammadiyah yang pada akhirnya sesuai keputusan Kongres Muhammadiyah ke-23 yang berlangsung pada 19-25 Juli 1934 di Yogyakarta diganti lagi menjadi Madrasah Mu'allimin untuk pendidikan khusus laki-laki dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah untuk wanitanya.⁷²

Pada tahun 1927 jumlah murid sekolah-sekolah tersebut tidak lebih dari 85, tetapi pada tahun 1936 jumlah itu bertambah menjadi 105 orang.⁷³ Khusus yang wanita pada tahun 1927 tidak lebih dari 43 siswa, tetapi pada tahun 1934 menjadi 40 per kelasnya.⁷⁴ Kebanyakan murid berasal dari seluruh lapisan masyarakat kelas menengah, meski pernah ada murid yang berasal dari keluarga bangsawan Sulawesi.⁷⁵ Lulusan dari sekolah ini kemudian ditugaskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ke berbagai daerah yang membutuhkan dan ternyata mereka dapat bekerjasama dengan tokoh-tokoh setempat membangun sekolah atau fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti masjid, dlsb.⁷⁶

Hizb al-wathan yang berarti pembela tanah air di lingkungan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan kepanduan yang didirikan pada tahun 1918 oleh Ahmad Dahlan sendiri. Gerakan kepanduan ini merupakan pendidikan non-formal bagi angkatan muda usia 7-17 tahun ke atas. Bermula dari *Sopo Tresno* dan *Siswo Proyo* yang didirikan pada tahun 1914. *Sopo Tresno* pada perkembangannya kemudian berubah menjadi *Aisyiyah* pada tahun 1918 dan merupakan bagian Muhammadiyah yang khusus menangani kegiatan kaum ibu. Perkembangan *Siswo Proyo* (pria dan wanita) terjadi pada tahun 1918 yang memisahkan angkatan muda laki-laki dengan wanita. Gerakan pandu *Hizb al-wathan* (H.W.) khusus menangani kegiatan remaja

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Taman Pustaka, *Suara Muhammadiyah* no. 1 th. 1923, hlm. 13.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Hoofdcomite Congres, *Buah Congres ke-23. op. cit.* hlm. 16.

⁷³Wawancara dengan H. Djindar Tamimy (68 th).

⁷⁴Wawancara dengan Ibu H. Alfiah Muhadi (71 th).

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Wawancara dengan K.H. AR Fakhruddin (74 th).

laki-laki, sementara wanitanya baru secara resmi mengubah nama menjadi Nasyiah al-aisiyah pada tahun 1931.⁷⁷

H.W. merupakan gerakan para pemuda untuk belajar, berlatih ilmu dan keterampilan di luar sekolah dalam bentuk kepanduan. Tingkatan pandu H.W. terdiri dari :

1. Tingkat Athfal (7 - 11 tahun)
2. Pengenal (12 - 16 tahun)
3. Penghela (17 tahun - ke atas).⁷⁸

Kedudukan dan keberadaan H.W. diperkuat lewat keputusan Kongres Muhammadiyah ke-27 di Malang pada tahun 1938, yang memutuskan bahwa, H.W. merupakan tempat pendidikan anak-anak dan pemuda Muhammadiyah secara kepanduan yang tidak menyalahi agama Islam.⁷⁹

Kesadaran sejarah di H.W. dikembangkan melalui bagian pendidikan dengan cara menguji pengetahuan setiap pandu H.W. tentang kehidupan tokoh-tokoh besar. Mereka ini diarahkan pula agar timbul kesadarannya untuk memiliki sifat dan kebiasaan baik dari warisan tradisi.⁸⁰ Pewarisan itu meliputi antara lain: suka menolong kesengsaraan dan penderitaan umum, membantu fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang terkena musibah (kecelakaan, kematian, dsb.).⁸¹ Semakin jelas bahwa gerakan pandu H.W. tidak lain sebagai tempat pendidikan non-formal bagi anak-anak dan pemuda yang untuk itu berbagai pelajaran, pendidikan dan latihan diberikan berdasarkan tingkatan masing-masing.

Makna kedudukan H.W. di dalam Muhammadiyah dinyatakan sebagai penerus, pelangsung dan penyempurna pekerjaan yang dirintis oleh Muhammadiyah. Mereka sebagai anak-anak H.W. harus siap menolong dan berusaha berbuat sesuatu untuk kepentingan Muhammadiyah pada umumnya.⁸²

5. Penutup

Di bawah kepemimpinan karismatik 4 pemimpin awal (1912 - 1942) yang saleh, Muhammadiyah menerapkan tindakan rasionalisasi organisasi dan kegiatannya. Birokratisasi dijalankan guna memperjuangkan dan memperoleh

⁷⁷PP. Muhammadiyah, Tuntunan H.W., (Yogyakarta: 1961) hlm. 85 - 90.

⁷⁸Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta, *Buku Peraturan (Spelregel) H.W.* (Yogyakarta : Fajar, 1941) no. 2, h.m. 7.

⁷⁹H.W. Solo, *Berita H.W.*, no. 6-7 (Juli-Agustus) hlm. 13.

⁸⁰*Loc. cit.*

⁸¹*Ibid.*, hlm. 8-13.

⁸²*Ibid.*, hlm. 10.

ideologi nasionalisme guna menandingi kolonialisme dan unsur pendukungnya baik itu secara sosial maupun budaya.

Orientasi nilai yang dimiliki ditempuh melalui bidang pendidikan formal, non-formal maupun tradisional. Jenjang pendidikan itu meliputi tingkat anak-anak, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, sekolah khusus guru, kelompok-kelompok kecil informal dan gerakan kepanduan *Hizb al-wathan*. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah pada tahun 1912-1942 di pemukiman-pemukiman santri di kota Yogyakarta atas dasar kondisi internal organisasi seperti disebut di atas, ternyata mampu menghadirkan perubahan sosial baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta : LP3ES, 1987
- . (ed.). *Agama Islam Etos kerja dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : LP3ES, 1982.
- Alfian. *Islam Modernisme in Indonesia Politics. The Muhammadiyah Movement During the Dutch Colonial Period 1900-1942*, University of Wisconsin, 1969.
- Anderson, C. Arnold. "Modernisasi pendidikan" dalam *Modernisasi Dinamika pertumbuhan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980.
- Apter, David E. *The Politics of Modernization*, Chicago : Chicago Pres, 1969.
- Bakker, Y.W.M. "Indonesia 1970" dalam *Impact*, jilid V no. 11, 1976.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, terj. Daniel Dhakhidae, Jakarta : Pustaka Jaya, 1980.
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, terj. Saafroedin Bahar, Jakarta : Grafiti Press, 1985.
- Bradjanegara, Sutedja, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta, 1956.
- Chirot, Daniel. *Social Change in Twentieth Century*, USA : Harcourt Brace Javanovich. Inc., 1977.
- Departemen Penerangan R.I. *Muhammadiyah Setengah Abad 1912-1962*, Jakarta : Dep. Penerangan, 1963.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*. terj. Aswab Mahasin. Jakarta : Pustaka Jaya, 1983.
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan teori Sosial Modern*, terj. Suhema Kramadibrata, Jakarta : UI Press, 1985.
- Hadikusumo, Djarnawi. *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta : Persatuan, tt.
- Hassan, Ibrahim Hassan, *Islamic History and Culture*, Cairo Assiout University Press, 1975.
- Holt, Claire, Beneddiat R.O.G. Anderson, James Siegle. *Culture ang Politics in Indonesia*. London : Cornell University Press, 1972.
- Hunder W, *Overzicht van den economischen Toestand der inheemsche Bevolking van Java en Madoera* The Hague : Martinus Najfhoff. 1921.
- Idema, H.a., *Parlementaire Geschiedenis van Nederlandnsch Indie 1891-1818*, S. Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1942.
- Jay, Robert, R., *Religion and Politics in Rural Central Java*, USA : Yale University Press, 1963.
- Kahin, George Mc Turner., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New

- York : Cornell University Press, 1961.
- Kartodirdjo, Satono., "Some Problem and the Geneses of Nationalisme in Indonesia" dalam *Journal Southeast Asian History*, vol. 3, No. 1 Maret 1962.
- Khaldun, Ibnu., *Mukaddima*. Beirut : Al-maktaba al-madrasah wa al-dar al-kitab, 1979.
- Kreamer, H., *De Islam als Goddienstig.en Zendingsproblem*. Bandung : The Hague, 1938.
- Kohn, Hans., *The idea of Nationalism A Study its Origin and Background*. New York : The McMillan Company, 1961.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1987.
- , *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta : Shalahuddin Press, 1985.
- . *Social Change in Agrarian Society : Madura 1850-1940*, Disertasi tidak diterbitkan, Colombia University, 1980.
- Lenski, Gerhard E., *Power and Privilege*, New York : McGrawhill, 1966.
- Liddle, R. William., "Ethnicity ang Political Organization : Three East Sumatran Cases "dalam Claire Holt, et. al., *Culture and Politics in Indonesia*, London : Cornel University Press, 1972.
- Mayer, Frederick. A. *History of Educational Thought*, Ohio : Merrils Bock, 1966.
- Manacker, Julius, and Erwwin Pollack, (ed.), *Emerging Educational Issues*. Canada : Little Brown and co., 1974.
- Mosca, Gaetano. *The Ruling Class*, trans, by Hannah Khan, New York : MacGraw-Hill, 1939.
- Muhsin, Mahdi, *Ibnu Kaldun's Philosophy of History*. USA, Chicago Press, 1964.
- Myrdal, Gunnar, *Asian Drama : An Inguiry into the Poverty of Nations*. New York : Pantheon, 1968.
- Niel, Robbert van, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite* The Hague, 1960.
- Noer, Deliear, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1973.
- Olsen, Marvin E., *Th Process of Social Organization*. New Delhy : Oxford and IBH, 1975.
- Pemuda Muhammadiyah, *Buku peraturan (Spelregel) Hizb al-wathan*. Yogyakarta : Fajar, 1941.
- Pimpinan H.W. Solo, *Berita H.W. Solo* : Adil, 1938. No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Pebruari 1938 tahun ke III.

- . *Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia Timur*. Weltevreden : Landsdrukkerij, 1927.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buah Congres* ke 18. Yogyakarta : Persatuan, 1929.
- Buah Congres* ke XXI/1932; XXIII/1938; XXIX/1941. Yogyakarta : Persatuan.
- . *Verslag Muhammadiyah di Hindia Timur*. Yogyakarta : Persatuan, 1924.
- . *Statuten dan Houishoudelijk Reglement Muhammadiyah 1940*. Yogyakarta : Persatuan, 1941.
- . *Berita Tahunan 1927*. Weltevreden : Landsdrukkerij, 1935.
- . Almanak Muhammadiyah 1354/1935/1936. Yogyakarta, 1935.
- . Majelis Pengajaran dan pendidikan. *Berita pengajaran Muhammadiyah Hindia Belanda Timur 1930*. Yogyakarta, 1930.
- . *Tuntutan Hizb al-wathan*. Yogyakarta, 1961. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Suara Muhammadiyah*, No. 1-2 (Januari-Desember) 1922, tahun ke 3. No. 1 Juni, 1928 th. ke IX. No. 2-3, 1932. No. 5-6, 1933. th. ke XIV. No. 1 Mei 1933. No. 10 April 1934, th. ke XV. No. 1 Mei 1934. No. 8 Maret 1935, Th. ke XVI, No. 1 April 1935, No. 2 Juni 1936 th. ke XVIII, No. 1 Mei 1937, No. 9 Maret 1938, th. ke XIX No. 1 April 1938, No. 10 Maret 1939 th. ke XX No. 1 April 1939, No. 9 Januari 1940, th. ke XXI.
- . Almanak Muhammadiyah 1345/1926/1360/1941-1942; Yogyakarta : Persatuan.
- . *Muhammadiyah serta Bahagian Pemuda dan Bahagian 'Aisiyyah Seluruh Indonesia*. Yogyakarta : Persatuan, 1941.
- . *Reglemen Internaat Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta : Express, 1924.
- . *Peraturan Bale Kesehatan Muhammadiyah*. Yogyakarta : Persatuan, 1924.
- . *Suara 'Aisiyyah : Peringatan Congres Muhammadiyah ke XIX di Minangkabau*. Yogyakarta : Persatuan, 1930; 12 Desember 1939, tahun ke XIV.
- . Hoofdcomite Congres, *Qo'dah Muhammadiyah Bagian 'Aisiyyah dan Urusan-urusannya*. Yogyakarta : Persatuan, 1936.
- Peacock, James L., *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam*. terj. Cipta Kreatif. Jakarta : Cipta Kreatif, 1986.
- Poerprodjo, W., *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926*. Bandung : Rejama Karya.
- Ranneft, J.W. Meijer and W. Hunder, *Onderzoek naar den belastindruk op de Inlandeshe bevolking van Jaya en Modoera*. Weltevreden, 1926.

- Smith, Wilfred Cantwell. *Modern Islam in India*. London : Victor Gollanz Ltd., 1946.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 1981.
- Soerjomihardjo, Abdoerrachman, "An Analysis of Suwardi Surjonigrat's Ideals and National Revolutionary Action (1913-1922)". dalam *ilmu-ilmu Satera Indonesia* II Oktober 1964.
- . *Kota Yogyakarta 1880-1930*, Desertasi tidak diterbitkan, UGM Yogyakarta.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta : LP3ES, 1985.
- Sumadjo, Samsi, *Muhammadiyah dengan Tokoh-tokohnya dalam Kebangunan Islam*. Yogyakarta, 1967.
- Suratmin, dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Depdikbud, 1981.
- Veur, Paul W. van der, *Education and Social Change in Colonial Indonesia*. Ohio : Ohio University, 1969.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : ^{Muhammad}1979.
- Wach. Joachim, *Sociologi of Religion*. London : Chicago Press. 1962.
- Wall. S.L., van der, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. terj. Sumarsono Mestoko dan Achmad Dasuki. Jakarta : Depdikbud, 1977.
- Weber, Max. *The Theory of Sosial and Economic Organization*. trans. H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York : Oxford University Press. 1946.
- . *The Sociologi of Religion*, trans. Ephraim Fischhoff. London : 1965.
- . *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalisme*. trans by Talcott. New York : Charles Scribner's Sons, 1958.
- Wertheim, W.F., *Indonesia Society in Transition*. Netherlands : W. van Hoeve Ltd., 1956.
- . *Effects of Western Civilazation on Indonesia Society*. New York : Institut of Pasific Relation, 1950

SUMBER RESMI

- Staatsblad van Nederlandsch-Indie :
- Tahun 1892 Nomor 125
- Tahun 1893 Nomor 128
- Tahun 1905 Nomor 550
- Tahun 1925 Nomor 219.